

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Kajian Terdahulu

Kajian masa lalu adalah acuan eksplorasi untuk melacak hubungan dan motivasi baru untuk eksplorasi masa depan. Pemeriksaan masa lalu juga dapat berguna bagi peneliti yang menetapkan dan menunjukkan validitas penelitian. Dalam hal ini, analisis merangkum kajian yang dimanfaatkan dan yang tidak dimanfaatkan, serta eksplorasi masa lalu yang terkait dengan momentum penelitian. Berikut ini adalah pemeriksaan sebelumnya yang berlaku untuk kerangka kerja yang dipertimbangkan analisis.

Kajian pertama, berjudul "**Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Bener Meriah**" dilakukan oleh **Hasan Basri, dan Heru Fahlevi**. Prosedur pengumpulan informasi studi deskriptif kualitatif ini adalah sebagai persepsi, dokumentasi dan wawancara semi-terorganisir dengan satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) yang mengawasi subsidi otonomi khusus yang kemudian dipecah menggunakan teknik analisis dan interaktif. **Dengan tingkat penyelesaian aktivitas yang lebih tinggi, hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme transfer membawa perubahan yang signifikan. Meskipun kurangnya perencanaan menghasilkan pemilihan kegiatan yang tidak terkendali, hal ini memungkinkan penerapan program yang beragam dan strategis atau bekerja sesuai dengan kebutuhan lokal.**

Kedua, "**Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi**" adalah studi oleh **Khairil Akbar, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadlullah, dan Muhammad Siddiq Armia**. Penelitian semacam ini termasuk klasifikasi pemeriksaan kualitatif yang menggunakan strategi analisis deskriptif. **Temuan kajian menunjukkan bahwa DOKA diawasi secara serius. Ini terbukti oleh fakta bahwa tidak ada sistem pengawasan khusus atau pengawasan umum terhadap DOKA, dan tidak ada organisasi tertentu yang bertanggung jawab untuk mengarahkan sistem perencanaan hingga tahap pelaksanaan.**

Ketiga, kajian **Ikbal Ramzani P.** berjudul "**Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh Ditinjau Dari Maqashid Syariah**". Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, dan menganalisis data untuk menggambarkan keadaan. **Temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa pemerintah Aceh tetap menggunakan subsidi otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, pemanfaatan aset tersebut belum sepenuhnya mengatur aspek-aspek saat diterapkan. Alhasil, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan dana otsus.**

Keempat, "**Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Bener Meriah**" adalah penelitian yang dilakukan oleh **Milia Taurina**. Penelitian deskriptif kuantitatif menggambarkan situasi dengan mengumpulkan, menyusun, mengatur, dan menganalisis data. **Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pertukaran menghasilkan perubahan yang**

signifikan; Mereka membuat kegiatan lebih mungkin diselesaikan, yang memungkinkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan kebutuhan lokal dengan cara yang lebih strategis dan beragam. Namun, jika tidak diatur seperti yang diharapkan, hal itu juga dapat menyebabkan pilihan aktivitas yang liar atau vital. Untuk memastikan tanggung jawab dalam mengelola dana otsus, harus ada pedoman yang jelas dan membatasi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Suryani, Hasan Basri, Faisal. Yang berjudul “Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh dan Di Sumatera Utara”. Teknik pemeriksaan digunakan sebagai pedoman untuk menyelidiki informasi, kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi. 1) Hasil studi menunjukkan bahwa, dilihat dari total pendapatan kabupaten/kota, pajak daerah dan kompensasi/PDRB, dan SILPA/belanja daerah pada tahun sebelumnya, kabupaten dan kota di Aceh memiliki kondisi keuangan yang lebih baik daripada di Sumatera Utara; selain itu, 2) masyarakat kabupaten/kota Sumut memiliki kondisi keuangan daerah yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota Aceh dalam hal perbandingan konsumsi modal dengan penggunaan total belanja daerah.

Keenam, riset Martunis, Darwanis, Syukriy Abdullah. Yang berjudul “Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh”. Pengujian ini bersifat kuantitatif yang ditentukan untuk menganalisis variabel independen pada variabel dependen. Temuan studi ini menyarankan

agar SiLPA (belanja di atas anggaran) dan PAD (pendapatan asli daerah) harus diuji untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap belanja daerah Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah satu kabupaten/kota di LKPD Aceh dengan jumlah 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Sedangkan unit pemeriksaannya hanya informasi penelitian rencana pengeluaran dan informasi perubahan alokasi anggaran periode 2009 – 2012 untuk 23 kabupaten/kota di Aceh. Analisis regresi linier digunakan dalam berbagai cara dalam teknik analisis data penelitian ini. Studi ini menunjukkan bahwa SiLPA dan PAD saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi belanja daerah kabupaten/kota di Aceh

Table 3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Analisis
1	Hasan Basri, Heru Fahlevi	Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Bener Meriah	Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk	Mekanisme transfer membawa perubahan yang signifikan, dengan tingkat penyelesaian kegiatan yang lebih tinggi. Ini memungkinkan program atau kerja yang beragam

			mengumpulkan data semi terstruktur.	dan strategis sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi kurangnya perencanaan menyebabkan pemilihan kegiatan yang tidak terkendali.
2	Khairil Akbar, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadlullah, Muhammad Siddiq Armia	Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi	Studi kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif	Menunjukkan bahwa DOKA diawasi secara serius. Ini terbukti oleh fakta bahwa tidak ada sistem pengawasan khusus atau pengawasan umum terhadap DOKA, dan tidak ada lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses perencanaan hingga tahap pelaksanaan.
3	Iqbal Ramzani P.	Model Pengelolaan	Metode deskriptif	Pemerintah Aceh terus menggunakan dana

		<p>Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh Ditinjau Dari Maqashid Syariah</p>	<p>kualitatif</p>	<p>otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, penggunaan dana ini belum sepenuhnya mendominasi dimensi saat diterapkan. Oleh karena itu, dana otonomi khusus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
4.	<p>Milia Taurina</p>	<p>Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Bener Meriah</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Mekanisme transfer menghasilkan perubahan besar; mereka meningkatkan tingkat penyelesaian kegiatan, yang memungkinkan program dan kegiatan yang lebih beragam dan strategis</p>

				<p>sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, jika tidak direncanakan dengan baik, juga dapat mengakibatkan pemilihan kegiatan yang tidak terkendali atau strategis. Untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus, perlu ada peraturan yang jelas dan mengikat.</p>
5.	Suryani, Hasan Basri, Faisal.	Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh dan Di Sumatera Utara	Metode penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis data, kemudian dilanjutkan dengan hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kondisi keuangan kabupaten/kota di Aceh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara dilihat dari total

			<p>penelitian dan pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.</p>	<p>pendapatan daerah/penduduk, pajak daerah dan kompensasi/PDRB, dan SiLPA/belanja daerah tahun sebelumnya; dan</p> <p>2) kabupaten/kota Sumatera Utara mempunyai posisi fiskal daerah yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota Aceh dalam hal belanja modal relatif terhadap total belanja daerah.</p>
6.	<p>Martunis, Darwanis, Syukriy Abdullah.</p>	<p>Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah:</p>	<p>Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji variabel independen terhadap</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menguji pengaruh perhitungan waktu melebihi anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah</p>

		<p>Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh</p>	<p>variabel dependen.</p>	<p>di Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah satu kabupaten/kota di LKPD Aceh dengan jumlah 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Sedangkan unit analisisnya hanya data penelitian anggaran dan data perubahan alokasi anggaran periode 2009 – 2012 untuk 23 kabupaten/kota di Aceh. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis regresi linier. Studi ini menunjukkan bahwa SiLPA dan PAD baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri</p>
--	--	---	-------------------------------	--

				mempengaruhi belanja daerah kabupaten/kota di Aceh.
--	--	--	--	---

II.2. Kerangka Teori

II.2.1 Teori Ekonomi politik

Ekonomi politik adalah bidang yang mempelajari bagaimana kekuatan politik berfungsi sebagai pendukung (driven force) untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara. Berbicara tentang hubungan antara ekonomi dan politik dapat berarti menjelaskan hubungannya, menjelaskan hubungannya, atau bahkan menjadi normatif.

Deliarnov's Staniland (2006:8) menyatakan bahwa ekonomi politik berarti penelitian dan teori sosial yang kurang baik. Namun, ada sudut pandang lain yang menegaskan bahwa penelitian dan teori sosial dasar bukanlah satu – satunya aspek ekonomi politik. Caporaso dan Levine menyatakan hal ini dalam Deliarov (2006:8), mengatakan bahwa tujuan ekonomi politik adalah untuk memberikan saran kepada pengelola negara tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Hubungan antara ekonomi dan politik dapat dipahami sebagai otoritas politik digambarkan sebagai masalah bagaimana kekayaan serta kekuasaan berkorelasi. Penciptaan dan pembagian kekayaan sangat terkait dengan masalah ekonomi, seperti halnya pembagian kekuasaan politik. Untuk tujuan analisis, ilmu politik

dan ekonomi dianggap sebagai ilmu kekayaan dan kekuasaan. Ini karena kekuasaan dan kekayaan tidak bisa dibedakan diantaranya.

Ada banyak cara untuk melakukan ekonomi politik. Secara teoritis, ada dua pendekatan yang berbeda untuk melakukan ekonomi politik: pendekatan yang berpusat pada pasar (yang juga disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada negara), dan pendekatan yang berpusat pada negara (yang juga disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada pasar). Gagasan bahwa negara memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan merupakan dasar dari pendekatan yang berpusat pada negara. Strategi ini berbeda dari pendekatan ekonomi politik liberal klasik atau neoliberal, di mana negara bertindak hanya sebagai penjaga keamanan dan pasar mengizinkannya bekerja sepenuhnya. Beberapa teori ekonomi politik kontemporer dibahas oleh James A. Caporaso dan David P. Levine, di antaranya:

a. Pendekatan klasik

Metode klasik ini terdiri dari dua bagian. Pertama, diskusi tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri; kedua, teori distribusi dan nilai. Dalam pendekatan klasik, ahli ekonomi politik dari abad pertengahan mengemukakan dua gagasan utama: bahwa ekonomi adalah bagian dari dirinya sendiri dan bahwa ada perbedaan antara bidang ekonomi politik dan yang lain.

b. Pendekatan ekonomi politik Marxian

Kaum Marxis menganggap masalah legislatif sebagai pembagian antara masyarakat sipil dan publik; lebih tepatnya, dia percaya bahwa hanya

ranah publik yang memiliki kesetaraan. Menurutnya, peran negara dalam mengelola kepentingan adalah apa yang dilakukannya. Pandangan ekonomi politik Marxis mencoba memahami hubungan antara ekonomi dan negara. Reproduksi objektif dalam teori ini lebih penting daripada proses subjektif dari kemungkinan penilaian dan pengambilan keputusan individu.

II.2.2 Teori Rent Seeking

Kruger (1974) memperkenalkan teori Rent Seeking. Bhagwati (1982) dan Srinivasan (1991) memperluasnya untuk menggambarkan upaya seseorang atau kelompok untuk mengeksploitasi hukum untuk meningkatkan pendapatannya. Kruger memahami bahwa aktivitas seperti mencari makanan atau melobi izin dan merusak pembagian aset dan membuat ekonomi menjadi buruk. Untuk mengurangi kecurangan, Kruger menyarankan untuk mengubah kebijakan impor menjadi kebijakan tarif. Dengan kata lain, mengadopsi peraturan yang memungkinkan pasar beroperasi sepenuhnya akan mencegah perubahan garis.

Pencarian rente mengacu pada klasifikasi faktor produksi sebagai faktor pengembalian yang dibuat oleh Adam Smith dalam buku Wijayanto. Sewa adalah remunerasi properti, dan upah adalah kompensasi buruh. Ketika para ahli keuangan mencoba untuk mendapatkan sewa dari sumber daya yang tidak

merekamiliki, masalah muncul. Memaksakan model bisnis, atau kekuatan sindikasi yang dimiliki oleh otoritas publik dikenal sebagai sumber rente.¹²

Rent seeking, menurut kajian ekonomi politik Didik J. Rachbini, adalah pencarian uang dengan melibatkan model pengaruh dalam sindikasi, perijinan dan organisasi.¹³ Pebisnis dalam situasi ini menghasilkan keuntungan melalui persaingan yang tidak pantas untuk dilakukan. Pasar dipengaruhi oleh kekuatan. Menurut dia, para pengusaha dan organisasi yang mencari rental ekonomi mendapatkan keuntungan atau nilai dari orang lain terlepas dari mengendalikan bisnis melalui pengendalian pertarungan monopoli tentang standar dan pedoman permainan. Pencari rente adalah pelaku ekonomi yang berusaha menggunakan pengaruh dengan mengorbankan pihak lain.

Peningkatan keuangan di negara – negara Asia telah menjadi mahal dan boros karena praktik rent seeking dan tingkat korupsi yang tinggi. Biaya ini tinggi karena perpindahan sumber daya dan birokrasi yang rumit yang dibuat oleh staf pengemangan bisnis. Dalam tulisan Buchanan (1980) menarik garis antara sewa dan keuntungan. Praktek rent seeking para pengusaha merupakan upaya untuk memperoleh keistimewaan dari negara. Keistimewaan bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari penyediaan barang dan jasa tertentu dengan cara melobi dan menyuap mereka yang berkuasa. Kegiatan rent seeking cenderung menghasilkan transfer nilai daripada penciptaan nilai dalam bentuk

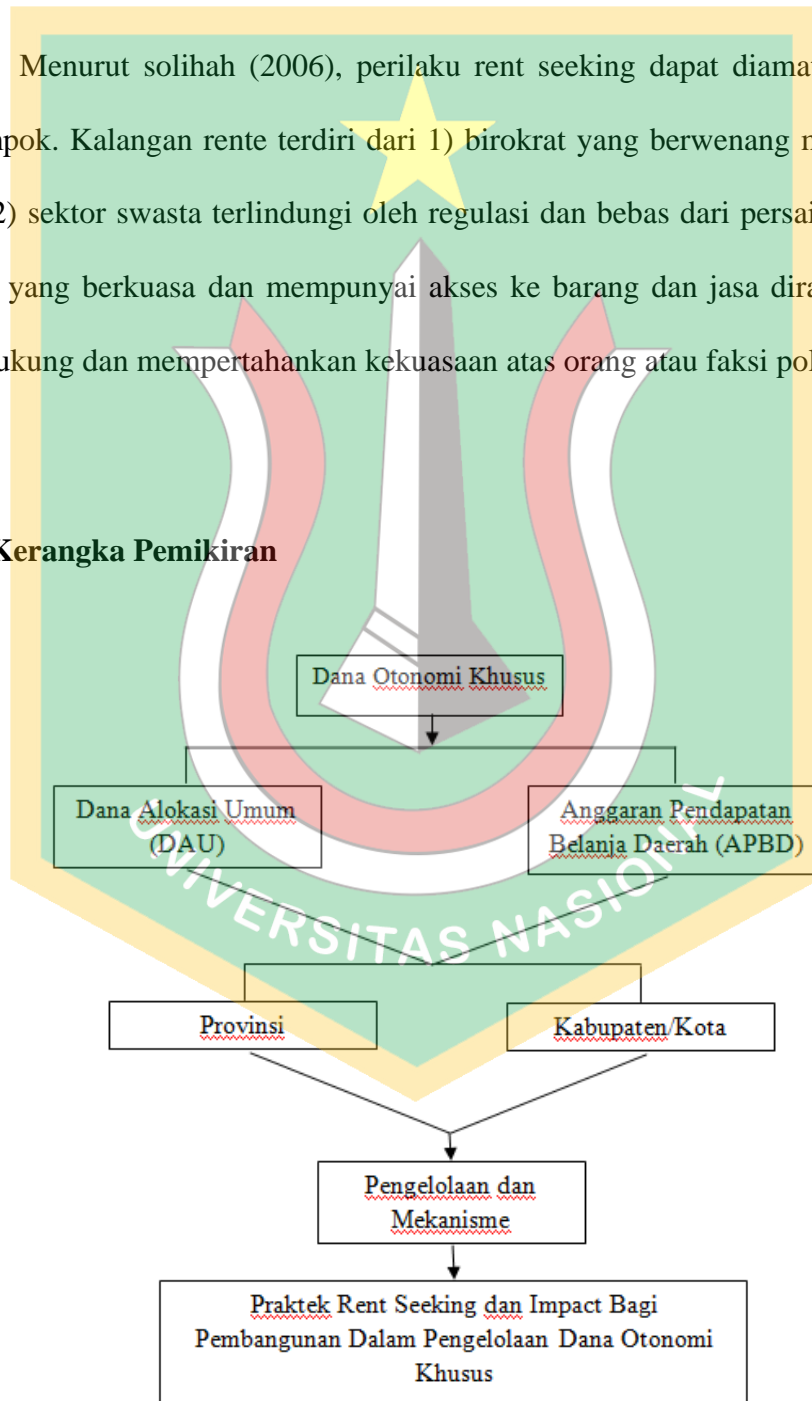
¹² *Wijayanto*, “KORUPSI MENGORUPSI INDONESIA Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan”. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2009), hal. 117.

¹³ *Ratnia Solihah*, “Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking”, *Jurnal Wacana Politik*, (Vol. 1, No. 1, Maret 2016), hlm. 42.

barang dan jasa. Pelaku usaha profit seeking adalah pengusaha yang memaksimalkan keuntungan mereka melalui peluang pemasaran. Kegiatan orientasi laba cenderung memotivasi pengusaha untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk menghasilkan lebih banyak penjualan melalui peluang pasar.

Menurut Solihah (2006), perilaku rent seeking dapat diamati dalam tiga kelompok. Kalangan rente terdiri dari 1) birokrat yang berwenang mengeluarkan izin; 2) sektor swasta terlindungi oleh regulasi dan bebas dari persaingan; dan 3) orang yang berkuasa dan mempunyai akses ke barang dan jasa dirancang untuk mendukung dan mempertahankan kekuasaan atas orang atau faksi politik tertentu.

II.3. Kerangka Pemikiran



Dalam pembahasan ini otonomi daerah tentunya merupakan pertimbangan alokasi anggaran antara pusat dengan daerah, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan daerah agar dapat memanfaatkan kemampuan daerah yang ada saat ini dan menggunakannya sebagai salah satu bentuk pendapatan. Oleh karena itu, Aceh merupakan salah satu daerah yang memperoleh kemerdekaan luar biasa yang diarahkan pada perluasan bantuan pemerintah perorangan.

Dengan dibuatnya undang – undang mengenai otonomi khusus ini maka pemerintah perlu mendukung dan mengapresiasi masyarakat agar provinsi yang mendapatkan otonomi khusus ini tetap bersatu dengan Indonesia. Namun, meskipun Aceh menerima dana otonomi khusus ini tidak menutup kemungkinan bahwa daerah tersebut dapat terlepas dari kemiskinan yang mana hal tersebut bukan lagi menjadi isu melainkan permasalahan yang sudah lama dinilai klise dimana pembangunan dalam upaya meretas kemiskinan tidak mencapai titik terang dan terkesan sia – sia apabila tidak dibongkar akarnya.

